



Anggaran Kemacetan Rp 6,9 T, Pengamat: Tidak Memberikan Pengaruh yang Signifikan

JAKARTA (Poskota) - Akademisi Universitas 17 Agustus, Fernando Emas menyoroti Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang memberi anggaran sebesar Rp 6,9 triliun untuk mengatasi persoalan kemacetan di Jakarta.

Pasalnya, anggaran sebesar Rp 6,9 triliun tersebut dapat dibilang pemborosan apabila tidak disubsidi pada perluasan jangkauan transportasi umum pada wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodebek).

"Saya sangat yakin tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan dan akan terkesan pemborosan anggaran kalau anggaran memberikan subsidi pada transportasi umum massal tanpa memperluas jangkauan dan memperbanyak jangkauan di sekitar Bodetabek," ujar Fernando saat dikonfirmasi, Rabu (6/12).

Fernando mengatakan, anggaran Pemerintah DKI Jakarta tahun 2024 sebesar Rp 6,9 triliun yang dialokasikan untuk mengatasi macet harus benar-benar memberikan dampak men-

urangi kemacetan.

Jangan sampai, lanjut Fernando, anggaran yang sangat besar tersebut tidak berhasil memberikan dampak terhadap pengurangan macet. "Sebaiknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kajian dengan pihak-pihak yang ahli untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta sehingga anggaran besar yang dikeluarkan tidak sia-sia," tuturnya.

Saat ini, lanjut Fernando, Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan kajian apa penyebab dari masyarakat DKI Jakarta masih lebih suka menggunakan kendaraan pribadi.

"Saya yakin yang menyebabkan masih banyak masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya menggunakan transportasi pribadi karena masih banyak daerah sekitar Bodetabek yang jauh dari tempat transportasi umum massal menuju Jakarta," tandasnya.

Diketahui, Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI mengalokasikan Rp 6,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) 2024 untuk penanganan macet di Jakarta.

"Iya (sebesar Rp 6,9 triliun). Tapi kan itu ada posnya." ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Jumat (24/11/2023).

Dari besaran anggaran itu, Pemprov DKI menggunakannya untuk berbagai program. Salah satunya memberikan subsidi untuk transportasi umum, antara lain LRT, MRT dan transjakarta.

Besaran anggaran untuk public service obligation (PSO) itu mencapai Rp 4,9 triliun. "Itu juga untuk penertiban lintasan dan parkir liar serta pengendalian lalu lintas (di Jakarta)," kata Syafrin.

Pemprov DKI saat ini disebut tengah fokus meningkatkan kualitas hingga kuantitas angkutan umum di Jakarta untuk memberikan keamanan serta kenyamanan masyarakat.

"Sehingga masyarakat bisa shifting menggunakan (dari) kendaraan pribadi (ke transportasi publik)," ucap Syafrin. **(Aldi/ham)**